

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS

#### A. Telaah Pustaka

Lembaga pemerintah memang lebih terkesan sebagai politik, akan tetapi didalam lembaga itu tetap memiliki aspek sebagai lembaga ekonomi disatu sisi sebagai lembaga pemerintahan melakukan bentuk pengeluaran guna membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan disisi lain lembaga ini harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh penghasilan guna menutupi biaya tersebut.

Berdasarkan aktivitas ekonominya, tidak dapat dihindari bila lembaga pemerintah juga membutuhkan jasa akuntansi, baik untuk meningkatkan mutu pengawasan maupun untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi.

#### 1. Pengertian Akuntansi

Menurut Sukrisno Agoes (2010:2) pengertian akuntansi sebagai berikut : sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan.

Menurut Abdul Halim (2001:5) akuntansi adalah:

Suatu kegiatan jasa, fungsinya untuk menyediakan informasi kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara berbagai alternatif arah tindakan. Akuntansi meliputi beberapa cabang antara lain : akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa informasi akuntansi dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi dengan cara mencatat, menggolongkan, dan mengikhtisarkan transaksi yang bersifat keuangan dalam bentuk laporan keuangan.

Bidang akuntansi secara keseluruhan dapat dikelompokkan kedalam tiga bagian yaitu :

1) Akuntansi pemerintahan

Akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintah dan lembaga yang tidak bertujuan mencari laba(digolongkan sebagai akuntansi mikro).

2) Akuntansi nasional

Akuntansi nasional adalah akuntansi sosial atau biasa disebut akuntansi makro adalah akuntansi yang khusus ditetapkan oleh lembaga dalam arti makro akuntansi.

3) Akuntansi perusahaan

Akuntansi perusahaan disebut juga akuntansi yang komersial adalah bidang akuntansi yang bertujuan mencari laba (*profit oriented*) secara rinci akuntansi perusahaan dapat dibedakan menjadi akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen lebih ditujukan untuk menghasilkan informasi keuangan bagi pengelola perusahaan.

## 2. Pengertian Sistem

Menurut W. Gerald Cole sistem adalah:

“suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan skema yang menyeluruh untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari perusahaan.(Zaki Baridwan, 1991; 1) Menurut Steven A. Moscovice sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari interaksi elemen-elemen (dikatakan sub sistem) yang berusaha mencapai tujuan tertentu.(Narko, 2002; 2)”

## 3. Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Bstian ( 2001: 2005 ) Sistem akuntansi keuangan daerah diartikan sebagai : sistem yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah yang menghasilkan informasi keuangan dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan.

## 4. Pengertian Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (2012:25) keuangan daerah adalah:

Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pada prinsipnya pengertian keuangan negara sama dengan keuangan daerah, perbedaaan antara keuangan negara dengan keuangan daerah adalah keuangan negara meliputi semua aspek kekayaan negara, sedangkan keuangan daerah hanya meliputi pengelolaan keuangan suatu daerah tertentu saja. Pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan perencanaan dari anggaran daerah.

Abdul Halim dalam Sefni Kasmita (2003:14) mengemukakan bahwa: Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintahan daerah (kabupaten, kota atau provinsi) yang memerlukan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dari beberapa definisi di atas terdapat dua hal yang perlu dijelaskan yaitu :

- 1) Hak adalah hak untuk memungut sumber-sumber penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain. Dan atau hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain seperti dana alokasi umum dan dana alokasi khusus sesuai peraturan yang ditetapkan. hak tersebut akan menaikkan kekayaan daerah.
- 2) Kewajiban adalah kewajiban untuk mengeluarkan uang untuk membayar tagihan-tagihan kepada daerah dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, infrastruktur, pelayanan umum, dan pengembangan ekonomi. Kewajiban tersebut akan menurunkan kekayaan daerah.

Menurut Indra Bastian (2001:151) sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Sistem yang mengelola semua transaksi keuangan, asset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah, yang menghasilkan informasi keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan.

### **5. Tujuan Akuntansi Keuangan Daerah**

Tujuan akuntansi keuangan daerah Indra Bastian (2001:165) menyatakan bahwa tujuan akuntansi keuangan daerah yaitu :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisiensi ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercaya kepada organisasi.
2. Memberi informasi yang memungkinkan untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas operasi pemerintah dan menggunakan dana publik.

### **6. Kedudukan akuntansi keuangan daerah dalam akuntansi**

Akuntansi terdiri atas tiga bidang utama, yaitu akuntansi komersil (perusahaan), akuntansi pemerintahan, dan akuntansi sosial. Dalam akuntansi komersil, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi keuangan kepada manajemen, pemilik modal, kreditor, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut.

Dalam akuntansi pemerintahan, data akuntansi digunakan untuk memberikan informasi mengenai transaksi ekonomi dan keuangan pemerintah kepada pihak eksekutif, legislative, yudiaktif, dan masyarakat. Akuntansi sosial merupakan bidang akuntansi khusus untuk diterapkan pada lembaga dalam arti makro, yang melayani perekonomian nasional. Sebagai contoh adalah pembayaran Negara, rekening arus dana, rekening pendapatan, dan produksi nasional, serta neraca nasional. Lingkup Akuntansi Pemerintahan adalah:

- a. Akuntansi Pemerintah Pusat
- b. Akuntansi Pemerintah Daerah, terdiri dari :
  1. Akuntansi Pemerintah Provinsi
  2. Akuntansi Pemerintah Kabupaten/Kota

## **7. Perbedaan Laporan Keuangan Sektor Publik Dengan Laporan Keuangan Perusahaan**

Menurut Mardiasmo (2002:173) menyebutkan perbedaan laporan keuangan sector public dan laporan keuangan sector swasta ialah sebagai berikut :

- a. Fokus dan lingkup laporan keuangan  
Laporan keuangan sektor publik berfokus pada masalah financial dan politik, sehingga sektor publik diukur berdasarkan aspek financial dan non financial, sedangkan laporan keuangan sektor swasta menitik beratkan kinerja pada aspek keuangan.
- b. Akuntabilitas  
Pertanggungjawaban laporan keuangan sektor public ditujukan pada pihak legislative / parlemen dan masyarakat sedangkan pertanggungjawaban laporan keuangan sektor swasta ditujukan kepada para pemegang saham kreditor .
- c. Orientasi laporan keuangan

- Laporan keuangan sektor public lebih berorientasi pada jangka panjang karena terikat dengan konsep politik, dan kenegaraan, sedangkan laporan keuangan sektor swasta orientasinya jangka panjang.
- d. Aturan laporan  
Laporan keuangan sektor publik ditentukan oleh standar akuntansi publik (SAP) sedangkan laporan keuangan sektor swasta ditentukan oleh standar akuntansi keuangan (SAK).
  - e. Pihak pemeriksa  
Laporan keuangan sektor publik diperiksa oleh BPK sedangkan sektor swasta diperiksa oleh auditor yang independent.
  - f. Pengguna dasar akuntansi  
Pengguna dasar akuntansi akrual disektor swasta telah berjalan lama, sedangkan di pemerintahan sebagian besar masih menggunakan dasar akuntansi kas.

## 8. Lingkungan Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul Halim (dalam Muhammad Syam Kusufi 2012:40) mengemukakan bahwa :

Seluruh informasi dan data-data yang disusun dalam laporan keuangan yang di hasilkan oleh akuntansi keuangan daerah akan digunakan oleh berbagai pihak eksternal, yaitu pihak-pihak eksternal Pemerintah Daerah yang berkepentingan terhadap pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung biasanya disebut sebagai Pemangku Kepentingan (stakeholders) yang meliputi :

1. DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah)  
DPRD adalah badan yang memberikan otorisasi kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah.
2. Badan Pengawas Keuangan  
Badan Pengawas Keuangan adalah badan yang melakukan pengawasan atas pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan pemerintah daerah.
3. Investor, Kreditor, dan Donatur  
Badan atau organisasi pemerintah, lembaga keuangan, maupun lainnya baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang menyediakan sumber keuangan bagi pemerintah.
4. Analisis Ekonomi dan Pemerhati Pemerintah Daerah  
Yaitu pihak yang menaruh perhatian atas aktivitas yang dilakukan pemerintah daerah, seperti : lembaga pendidikan, ilmuwan, peneliti, konsultan, dan lain-lain.

5. Rakyat  
Rakyat disini adalah kelompok masyarakat yang menaruh perhatian kepada aktivitas pemerintah khususnya yang menerima pelayanan pemerintah daerah atau yang menerima prosuk dan jasa pemerintah daerah.
6. Pemerintah Pusat  
Pemerintah pusat memerlukan laporan keuangan pemerintah daerah untuk menilai pertanggung jawaban Gubernur sebagai wakil pemerintah.
7. Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten, atau Kota)  
Pemerintah daerah saling berkepentingan secara ekonomi misalnya dalam hal melakukan pinjaman.

## **9.Sistem Pencatatan dan Dasar Pengakuan Akuntansi Keuangan Daerah**

### **a. SistemPencatatan**

Menurut Abdul Halim (2012:44)Akuntansi adalah:

Proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi. Yang dimaksud pengidentifikasian adalah pengidentifikasian transaksi ekonomi, agar dapat membedakan yang mana transaksi yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak.Pada dasarnya ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Jadi, semua transaksi didalam akuntansi harus dinyatakan dalam satuan uang. Proses berikutnya adalah pencatatan ekonomi, yaitu pengolahan data transaksi ekonomi tersebut melalui penambahan dan atau pengurangan atas sumber daya yang ada. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:45-51) Ada

beberapa sistem pencatatan yang dapat digunakan yaitu :

1. *Single entry*

Sistem pencatatan *single entry* sering juga disebut dengan sistem pencatatan tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatat satu kali. Transaksi yang berakibat bertambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas akan dicatat pada sisi pengeluaran.

2. *Double entry*

Sistem pencatatan *double entry* juga sering disebut dengan tata buku berpasangan. Pencatatan dengan sistem ini ada sisi debit dan kredit. Setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut :

**ASET + BEBAN = UTANG + EKUITAS + PENDAPATAN**

3. *Triple entry*

Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan *double entry*, ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran.

b. Dasar Pengakuan

Dasar pengakuan (*recognition*) adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat. Untuk menentukan kapan suatu transaksi dicatat digunakan berbagai sistem atau basis atau dasar akuntansi.

Menurut Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi (2012:5-55) dasar akuntansi terbagi empat yaitu :

1. Basis kas (*cash basis*)

Basis kas, seperti telah diuraikan sebelumnya menetapkan bahwa pengakuan/pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi tersebut menimbulkan perubahan atau berakibat pada kas, apabila suatu transaksi bukan menimbulkan perubahan kas, maka transaksi tersebut tidak dicatat.

2. Basis akrual (*acrual basis*)

Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa itu terjadi dan bukan hanya saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa dicatat

dalam catatan akuntansi dan diakui dalam pelaporan keuangan pada periode terjadinya.

3. Basis kas modifikasian (*modified cash basis*)

Basis kas modifikasian mencatat transaksi selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada tahun anggaran berdasarkan basis akrual.

4. Basis akrual modifikasian (*modified accrual basis*)

Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dan menggunakan basis akrual untuk sebahagian besar transaksi. Pembatasan penggunaan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan kepraktisan.

## 10. Siklus akuntansi Keuangan Daerah

Pada dasarnya siklus akuntansi keuangan daerah mengikuti siklus akuntansi.

Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah tahap – tahap yang ada dalam siklus akuntansi.

Menurut Kusunadi (2002;126) adapun tahapan-tahapan siklus akuntansi yaitu:

- a. Melaksanakan transaksi
- b. Mencatat transaksi kedalam bukti transaksi
- c. Menjurnal
- d. Memposting
- e. Membuat neraca percobaan sebelum jurnal penutup
- f. Membuat neraca lajur
- g. Membuat neraca
- h. Membuat laporan surplus dan deficit
- i. Membuat jurnal penutup
- j. Membuat neraca setelah jurnal penutup

## 11. Peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Kerangka konseptual akuntansi pemerintah adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintah, dan merupakan acuan bagi komite Standar Akuntansi Pemerintah, penyusunan laporan

keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah. Sistem akuntansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggaraan, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan dilingkungan organisasi pemerintah.

## **12.Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006**

Menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (3) Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah adalah:

Serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, penggolongan, dan peringkasan atas transaksi dan atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.

Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 232 ayat (6) juga disebutkan bahwa dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), entitas akuntansi menyusun laporan keuangan yang meliputi :

1. Laporan realisasi anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas laporan keuangan

Sistem akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas empat prosedur akuntansi yaitu : prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi selain kas dan prosedur akuntansi selain aset.

a. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau SKPKD. Prosedur akuntansi penerimaan kas :

- 1) Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat kedalam buku jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaan kas tersebut.
- 3) Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain :
  - a) Surat Tanda Bukti Pembayaran (STBP)
  - b) Surat Tanda Setoran (STS)
  - c) Bukti Transfer
  - d) Nota Kredit
  - e) Buku Penerimaan Lainnya
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting kedalam buku besar.

- 5) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.
- 6) Pencatatan kedalam buku besar penerimaan kas, buku besar dan buku pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
- 7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.

b. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, pengikhtisaran atas transaksi dan/ atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksana APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD dan/ atau SKPKD. Prosedur akuntansi pengeluaran kas menurut peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 :

- 1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat kedalam buku jurnal pengeluaran kas, disertai rekening-lawan asal pengeluaran kas tersebut.

- 3) Bukti transaksi pengeluaran kas mencakup antara lain :
    - a) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    - b) Bukti Transfer
    - c) Nota Kredit
    - d) Bukti Pengeluaran Lainnya
  - 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik atau berkala melakukan posting kedalam buku besar.
  - 5) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian dan kontrol buku besar.
  - 6) Pencatatan kedalam buku besar pengeluaran kas, buku besar dan buku pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku.
  - 7) Pada akhir periode, fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD menyusun laporan keuangan.
- c. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas adalah meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi mulai pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan/ atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keuangan dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan transaksi dan/ atau kejadian selain kas pada SKPD dan/ atau SKPKD. Prosedur akuntansi selain kas :

- 1) Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Transaksi dan/ atau kejadian selain kas, antara lain :
  - a) Pengesahan pertanggung jawaban (SPJ) pengeluaran dana
  - b) Koreksi kesalahan pencatatan
  - c) Penerimaan hibah/ donasi selain kas
  - d) Pembelian secara kredit
  - e) Retur pembelian kredit
  - f) Pelepasan hak atas aset/ barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
  - g) Penerimaan aset tetap/ barang milik daerah tanpa konsekuensi kas
- 3) Bukti transaksi dan/ atau kejadian selain kas, antara lain :
  - a) Berita acara penerimaan barang
  - b) Surat keputusan penghapusan barang
  - c) Surat pengiriman barang
  - d) Surat keputusan mutasi barang
  - e) Berita acara pemusnahan barang
  - f) Berita acara serah terima barang
  - g) Berita acara penilaian
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/ atau kejadian melakukan pencatatan ke bukti memorial.

- 5) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat ke dalam buku jurnal umum.
  - 6) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting ke buku besar.
  - 7) Jika dianggap perlu fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD dapat membuat buku besar pembantu yang berfungsi sebagai rincian buku besar dan berlaku sebagai kontrol.
  - 8) Pencatatan ke dalam buku jurnal umum dan buku besar pembantu dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- d. Prosedur akuntansi aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan, rehabilitas, penghapusan, pemindahtanganan, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/ atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan aset yang dikuasai/ digunakan SKPD dan/ atau SKPKD. Prosedur akuntansi aset antara lain :

- 1) Prosedur akuntansi aset pada SKPD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada PPK-SKPD serta pejabat, pengurus, dan penyimpan barang. Sedangkan, pada SKPKD dilaksanakan oleh fungsi akuntansi pada SKPKD.
- 2) Bukti transaksi dan/ atau kejadian akuntansi aset terdiri dari :
  - a) Berita acara penerimaan barang

- b) Surat keputusan penghapusan barang
  - c) Surat pengiriman barang
  - d) Surat keputusan mutasi barang
  - e) Berita acara pemusnahan barang
  - f) Berita acara serah terima barang
  - g) Berita acara penilaian
  - h) Berita acara penyelesaian pekerjaan
- 3) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti transaksi dan/ atau kejadian melakukan pencatatan kebukti memorial.
- 4) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD berdasarkan bukti memorial mencatat kedalam buku jurnal umum.
- 5) Fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan/ atau fungsi akuntansi pada SKPKD secara periodik melakukan posting kebuku besar.
- 6) Setiap akhir periode, semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan SKPD dan/atau SKPKD.

### **13.Peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007**

Dalam rangka memenuhi aspirasi daerah dan permasalahan teknis dalam pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan penyempurnaan terhadap perubahn Permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri nomor 59 tahun 2007 dalam pasal 189 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa bendahara penerimaan

wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya penata usahaan atas peneimaan menggunakan buku kas umum, buku pembantu per rincian objek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian.

#### **14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011**

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dalam uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjwaban, dan pengawasan keuangan daerah.

#### **15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013**

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 merupakan peraturan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual Pada pemerintah daerah. Standar ini digunakan untuk pengambilan keputusan, kebijakan akuntansi dan rujukan dalam proses pembuatan laporan keuangan berbasis akrual.

#### **B . Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas, telah dikemukakan sebelumnya maka dapat dibuat suatu hipotesis sebagai berikut: **“Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah Pada Kantor Camat Tiltang Kamang Kabupaten Agam Sumatera Barat belum sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan”**